



SEJARAH PENDIDIKAN ANAK LUAR BIASA DI INDONESIA

Sofia Rahma Yulita¹, Rindi Anfika², Annisah Fitriah³, Yulia Fitriani⁴, Eka Puji Lestari⁵

¹²³⁴⁵STKIP Widyaswara Indonesia

¹²³⁴⁵rahmayulitasofia@gmail.com, rindianfika11@gmail.com, annisahfitriah033@gmail.com,
fitrianiyulia77@gmail.com,

Abstract

This research aims to reveal the history of education for children with needs in Indonesia. Education is a basic need for every human being, including children with special needs (ABK) who have limitations in carrying out their activities. Children with special needs (ABK) have different characteristics from each other. Therefore, children with special needs must have special educational services that are tailored to the child's abilities according to their potential. In this research, the author uses the Library Research method, namely collecting data or scientific writing aimed at the research object. Inclusive education is an alternative education for children with special needs who experience physical limitations but can still follow the material taught in public schools. Many of those who attend public schools can follow the learning and are even able to beat children who grow up physically intact from the material they are tested on. By joining a public school, it gives them the opportunity to socialize with children who are growing normally to help the child's emotional development so that they do not become inferior children, and even consider themselves the same as other children. This is the basis on which inclusive education is implemented. Every citizen has the same right to obtain quality education. Citizens who have physical, emotional, mental, intellectual or social disabilities have the right to receive special education.

Keywords: ABK History, Inclusive Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang sejarah pendidikan anak berkebutuhan di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki keterbatasan dalam menjalani aktivitasnya. Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sama lain. Oleh karena itu pula anak berkebutuhan khusus harus memiliki layanan pendidikan yang khusus yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Library Research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian. Pendidikan inklusif menjadi alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik namun masih dapat mengikuti materi yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Banyak diantara mereka yang bersekolah di sekolah umum dapat mengikuti pembelajaran dan bahkan mampu mengalahkan anak-anak yang tumbuh dengan fisik yang utuh dari materi yang diujikan kepada mereka. Dengan bergabungnya mereka di sekolah umum memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan anak yang tumbuh dengan normal untuk membantu perkembangan emosional anak tersebut agar tidak menjadi anak yang minder, dan bahkan menganggap diri mereka sama dengan anak yang lain. Hal inilah yang mendasari

pendidikan inklusif diselenggarakan. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Kata kunci: Sejarah ABK, Pendidikan Inklusif

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan individu dan kelompok untuk tujuan pembangunan nasional, apalagi di era sekarang ini. Karena pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dan keterampilannya agar dapat bertahan ketika dihadapkan permasalahan di kemudian hari. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran dimana siswa mempelajari, mengevaluasi, dan mengulangi ilmu yang dipelajari di sekolah. Hakikatnya, pendidikan adalah proses pendewasaan manusia. Pendidikan mampu mengubah manusia dari kebodohan menjadi manusia berpengetahuan, dari yang jahat menjadi baik, dan dari yang tidak bermoral menjadi bermoral. Pendidikan bukan sekedar transmisi informasi pengetahuan kepada peserta didik, tetapi penciptaan situasi yang membimbing, mendorong, dan membimbing kegiatan belajar siswa ke arah yang lebih optimal.

Pendidikan merupakan proses penting yang dibutuhkan setiap manusia terutama pada anak, karena pada masa tersebut anak memperoleh pengetahuan baru dengan seiring perkembangannya. Dan pendidikan merupakan hak asasi yang mendasar, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki

hambatan, kelainan dan/atau memiliki kemampuan potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam layanan pendidikan. Hal tersebut dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan *Inklusif* Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Undang-Undang Pendidikan Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dan seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai akses terhadap pendidikan. Namun kenyataannya, hal ini tidak mudah. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus harus bekerja dan berupaya ekstra untuk menyekolahkan anaknya. Pendidikan formal tidak mudah diakses karena tidak semua sekolah mampu menampung siswa berkebutuhan khusus. Salah satunya karena keengganan guru dalam memilih metode yang tepat bagi siswanya.

Tidak semua anak yang lahir ke dunia ini akan selalu mengalami perkembangan normal. Banyak di antaranya yang mengalami hambatan, kendala, keterlambatan, atau faktor risiko dalam perkembangannya sehingga memerlukan penanganan dan intervensi khusus agar perkembangannya optimal. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus atau *special child*. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus biasanya meliputi tingkat perkembangan keterampilan sensorik, motorik, kognitif, dan bahasa, kompetensi diri, konsep diri, keterampilan interaksi sosial, dan kreativitas. Untuk memahami anak-anak dengan kebutuhan khusus atau luar biasa, penting untuk memahami jenis-jenis disabilitas dan dampak yang dialami anak-anak yang

terkena dampak. Anak berkebutuhan khusus disebut anak berkebutuhan khusus karena termasuk anak yang menunjukkan kelainan atau kelainan tumbuh kembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial dibandingkan dengan anak normal. Karakteristik setiap siswa berkebutuhan khusus memerlukan keterampilan khusus dari guru. Guru memerlukan keterampilan untuk menggabungkan keterampilan dan bakat setiap anak dalam bidang berpikir, penglihatan, mendengarkan, berbicara dan keterampilan sosial.

Menurut Hafiz (2017) dalam Fauzan, dkk. (2021: 497-498) menyebutkan bahwa Pendidikan inklusif menjadi alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik namun masih dapat mengikuti materi yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Banyak diantara mereka yang bersekolah di sekolah umum dapat mengikuti pembelajaran dan bahkan mampu mengalahkan anak-anak yang tumbuh dengan fisik yang utuh dari materi yang diujikan kepada mereka. Dengan bergabungnya mereka di sekolah reguler (*non* SLB) memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan anak yang tumbuh dengan normal untuk membantu perkembangan emosional anak tersebut agar tidak menjadi anak yang minder, dan bahkan menganggap diri mereka sama dengan anak yang lain. Hal inilah yang mendasari pendidikan *inklusif* diselenggarakan. Pendidikan *inklusif* ini memberikan akses pendidikan formal di sekolah-sekolah umum seperti; SD, SMP, dan SMA sederajat kepada anak-anak yang memiliki kelainan baik fisik seperti; *tunanetra*, *tunarungu*, *tunawicara*, *tunadaksa* dan juga kepada anak-anak yang mengalami kelainan secara mental seperti; *tunagrahita*, *tunalaras*, *autis*, dan lain sebagainya. Begitu juga akses pendidikan inklusif ini juga menerima anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan yang

luar biasa dan anak-anak yang memiliki bakat istimewa dari siswa lainnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. *library research* juga menjadi langka awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teori atau mempertajam metodologi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan adalah pengalaman belajar seumur hidup yang terjadi di seluruh lingkungan dan mempengaruhi perkembangan setiap individu. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menjadikannya lebih dewasa melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Menurut Longfeld, pendidikan berarti secara sadar dan sengaja membantu seorang anak (yang belum dewasa) tumbuh menuju kedewasaan, sehingga anak dapat berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab moral. Artinya mampu melakukan segala sesuatu, atau mampu membentuk segala tingkah laku sesuai ke norma.

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh warga negara dengan berbagai kemampuan (disabilitas) tanpa kecuali, sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945 Pemerintah memberikan jaminan penuh bahwa seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), mendapatkan layanan pendidikan yang sama, dan kualitasnya tidak ada duanya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Untuk menerima kesempatan pendidikan yang sama dengan anak-anak (normal) lainnya.

Anak berkebutuhan khusus tidak serta merta mempunyai kelainan mental, emosional, atau fisik, mereka adalah anak yang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan anak-anak lainnya. Kelainan fisik dapat mencakup cacat fisik seperti tidak adanya mata. Gangguan yang bersifat mental atau psikologis. Misalnya saja orang yang menderita keterbelakangan mental karena kecerdasannya di bawah rata-rata. Disabilitas sosial mencakup orang-orang yang tidak diterima secara sosial oleh masyarakat sekitar dan tidak mampu bersosialisasi atau berkomunikasi sehingga mengakibatkan kurangnya interaksi sosial dan rasa rendah diri yang berlebihan. Mereka memiliki moral, emosi, dan hati nurani yang tidak normal serta berperilaku tidak bermoral di masyarakat.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memerlukan layanan atau perlakuan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal akibat kelainan atau keuarbiasaan yang disandangnya. ABK juga mengalami perbedaan-perbedaan atau kekurangan dari dimensi yang penting. Mereka secara psikologis, fisik, dan sosial merasa kesulitan dalam melakukan tujuan, kebutuhan dan juga potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga dalam hal ini perlu penanganan yang lebih dalam segala proses belajar maupun interaksi sosialnya (Iswati & Rohaningsih, 2021). Pendekatan ABK mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam membantu individu dengan kebutuhan khusus. ABK

merujuk pada individu yang memiliki kebutuhan fisik, kognitif, emosional, atau sosial yang berbeda dari kebanyakan individu lainnya.

Menurut Simamora, dkk (2022) dalam Fitrianingrum, dkk (2023:57) menyatakan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, menurut psikologi humanistik, pada hakekatnya merupakan usaha kemanusiaan yang harus dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, dari segi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah, pemerintah, dan wali serta yayasan pendidikan khususnya. Sudah sepantasnya bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat umum untuk mewaspadai anak berkebutuhan khusus mengingat keadaan saat ini. Hal ini agar tidak ada yang memandang anak berkebutuhan khusus sebagai individu lemah yang tidak berhak mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam sejarah perkembangan model pendidikan ABK, terdapat 3 pelayanan, yaitu pemisahan (*segregasi*), terpadu (*mainstream*) dan *inklusif*. Model pertama adalah bentuk pendidikan yang tersegregasi disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) model ini ditandai dengan pemisahan layanan ABK dengan anak normal. Hal ini mencerminkan pelabelan negatif pada ABK dengan siswa lainnya. Pelayanan pendidikan ABK mempunyai model kedua *mainstream*, yaitu suatu sistem pendidikan yang menempatkan ABK pada sekolah biasa dan mengikuti peraturan kurikulum yang berlaku. Biasanya ditargetkan pada anak-anak sakit dengan gangguan kognitif seperti epilepsi, asma, dan gangguan sensorik, serta anak-anak dengan disabilitas fisik. Hartadi, et al (2019: 90) mengemukakan sejak munculnya konsep *mainstream* pada tahun 1980an, sekolah negeri gencar mempromosikan pendidikan ABK

komprehensif. Pendidikan *inklusif* atau menggabungkan ABK dengan siswa “normal” dengan sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan anak.

2. Sejarah Pendidikan Luar Biasa

Sikap masyarakat internasional saat ini terhadap penyandang kebutuhan pendidikan khusus didasarkan pada berbagai upaya para filsuf, aktivis, dan humanis Eropa. Komitmen mereka sebagai reformis dan pemikiran inovatif menjadikan mereka katalis perubahan. Sejarah pendidikan biasanya menggambarkan permulaan pendidikan khusus pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Salah satu dokumen pertama yang mencoba menjelaskan pendidikan khusus adalah seorang dokter Perancis bernama Jean-Marc Gaspard Itard (1775-1838) yang berusaha mendidik Victor yang berusia 12 tahun, yang kemudian dikenal sebagai "Anak Liar Aveyron". Menurut legenda, Victor ditemukan oleh sekelompok pemburu di hutan dekat kota Aveyron. Ketika ditemukan, dia tidak berpakaian, tidak bisa berkata-kata, berlari tetapi tidak berjalan, dan menunjukkan perilaku seperti binatang. Itard, seorang ahli dalam pendidikan penyakit telinga dan remaja tunarungu, berusaha untuk "mendidik" Victor pada tahun 1799. Ia mencoba mengajari Victor melalui program pelatihan sensorik dan yang sekarang disebut modifikasi perilaku. Menjadi dewasa bahkan setelah lima tahun dedikasi dan semua pengalaman belajarnya, Itard tidak mampu mengembangkan bahasa yang lengkap dan hanya akrab dengan keterampilan dasar sosial dan menolong diri sendiri. Itard menganggap usahanya gagal. Namun kemudian ia mampu menunjukkan bahwa kemampuan belajar adalah mungkin bahkan pada orang yang digambarkan sebagai orang yang putus asa dan bodoh. Karena karya terobosannya 200 tahun lalu, Itard pantas diberi gelar "Bapak Pendidikan Khusus".

Pionir berpengaruh lainnya adalah murid

Itard, Edouard Séguin (1812-1880). Ia mengembangkan program pembelajaran untuk kaum muda yang dianggap tidak mampu belajar oleh profesional lain. Seperti mentornya Itard, Séguin dipengaruhi oleh pentingnya aktivitas sensorimotor sebagai alat pembelajaran. Metodologi ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kekuatan dan kelemahan siswa dan rencana pelatihan sensorimotor yang cermat untuk memperbaiki kekurangan tertentu. Séguin juga menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini. Ia dikatakan sebagai orang pertama yang menggunakan intervensi dini. Ide dan teori Séguin, yang dijelaskan dalam *bukunya Idiocy and its Physiological Treatment*, menjadi dasar bagi karya Maria Montessori selanjutnya dengan anak-anak miskin perkotaan dan keterbelakangan mental. Karya Itard, Séguin, dan para reformis lain pada masa itu membantu meletakkan dasar bagi banyak praktik pendidikan khusus saat ini. Contoh kontribusi ini mencakup pembelajaran yang dipersonalisasi, penggunaan teknik penguatan positif, dan keyakinan bahwa semua anak dapat belajar. Pada tahun 1948, Séguin bermigrasi ke Amerika Serikat dan selama beberapa tahun berikutnya membantu mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai *American Association for the Mentally Retarded* (AAMR). Pendeta Amerika Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) melakukan perjalanan ke Eropa, di mana dia belajar tentang teknik dan inovasi canggih dalam mengajar anak-anak *tunarungu*. Setelah kembali ke rumah, dia membantu mendirikan Suaka Amerika untuk Pendidikan *Tunarungu* di Hartford, Connecticut. Didirikan pada tahun 1817, sekolah ini merupakan sekolah berasrama pertama di Amerika Serikat dan sekarang dikenal sebagai *American School for the Deaf*. *Universitas Gallaudet* adalah institusi seni untuk mahasiswa tunarungu dan namanya didedikasikan untuk kontribusi mereka.

Di Indonesia, sejarah perkembangan pendidikan luar biasa dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia (1596-1942), mereka memperkenalkan sistem persekolahan dengan orientasi Barat. Untuk pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus dibuka lembaga-lembaga khusus. Lembaga pertama untuk pendidikan anak *tunanetra* dibuka pada tahun 1901, untuk anak *tunagrahita* tahun 1927, dan untuk anak *tunarungu* tahun 1930, ketiganya di Bandung. Tujuh tahun setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan undang-undang yang pertama mengenai pendidikan. Mengenai anak-anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, undang-undang itu menyebutkan: Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan (pasal 6 ayat 2) dan untuk itu anak-anak tersebut terkena pasal 8 yang mengatakan : semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka sekolah-sekolah baru yang khusus bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus, termasuk untuk anak tunadaksa dan tunalaras, dibuka. Sekolah-sekolah ini disebut sekolah luar biasa (SLB).

Sebagian berdasarkan urutan sejarah berdirinya SLB pertama untuk masing-masing kategori kecacatan, SLB-SLB itu dikelompokkan menjadi: (1) SLB bagian A untuk anak *tunanetra*, (2) SLB bagian B untuk anak *tunarungu*, (3) SLB bagian C untuk anak *tunagrahita*, (4) SLB bagian D untuk anak *tunadaksa*, (5) SLB bagian E untuk anak *tunalaras*, dan (6) SLB bagian G untuk anak cacat ganda. Eko (2006) mengemukakan bahwa dari jumlah keseluruhan 1.48 juta yang dikategorikan berkelainan, 21.42% merupakan anak-anak usia sekolah. Meskipun demikian, hanya 25% atau 79.061 anak yang sekarang ini berada di sekolah luar biasa. Beberapa sekolah

luar biasa yang mengakomodasi berbagai jenis kelainan dibangun untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Selain itu dilakukan juga berbagai upaya, salah satunya adalah sosialisasi dan implementasi pendidikan *inklusif*.

Herawati (2016: 502) menjabarkan sejarah perkembangan *inklusif* di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar biasa ke Scandinavia untuk mempelajari *mainstreaming* dan *Least restrictive environment*, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam *Ed. Act. 1991* mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak kebutuhan khusus dari *segregatif* ke *intergratif*. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan *inklusif* di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi "*Education for All*". Implikasi dari *statement* ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan *inklusif* yang selanjutnya dikenal dengan "*the Salamanca statement on inclusive education*". Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan *inklusif*, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.

Konsep pendidikan terpadu

diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1978 oleh *Helen Keller International, Inc.* Ketika itu HKI membantu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah terpadu bagi anak *tunanetra*. Keberhasilan proyek itu menyebabkan dikeluarkannya SK Mendikbud nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat, yang pada intinya mengatur bahwa anak berkebutuhan pendidikan khusus yang memiliki kemampuan dapat diterima bersekolah di sekolah reguler. Sayangnya, setelah proyek pendidikan terpadu itu berakhir, implementasi pendidikan terpadu itu semakin mundur, terutama di tingkat sekolah dasar. Akan tetapi menjelang akhir tahun 90-an muncul upaya baru untuk mengembangkan pendidikan *inklusif* melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dengan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB. Dengan implementasi pendidikan inklusif diharapkan lebih banyak anak berkebutuhan pendidikan khusus usia sekolah akan mendapatkan kesempatan bersekolah.

Pendidikan guru untuk PLB yang pertama, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), didirikan di Bandung pada tahun 1952, dengan lama pendidikan dua tahun. Pada mulanya SGPLB diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah berpengalaman mengajar di SD dan berizazah SGB. Dalam perkembangan selanjutnya, input SGPLB adalah tamatan SLTA, dan lulusannya dihargai sejajar dengan sarjana muda. Ketika SGPLB dilikuidasi pada tahun 1994, di seluruh Indonesia terdapat enam SGPLB (Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Makasar dan Padang). Likuidasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi guru PLB menjadi sekurang-kurangnya berizazah S1. Program S1 PLB yang pertama di Indonesia dibuka di IKIP Bandung (sekarang UPI) pada tahun 1964. Beberapa tahun kemudian beberapa IKIP dan perguruan tinggi lain juga membuka jurusan PLB. Kini

sembilan universitas di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, memiliki jurusan PLB. Pada tahun 1996 UPI membuka konsentrasi Bimbingan Anak Khusus pada program studi Bimbingan dan Penyuluhan di Program Pasca-Sarjana sebagai upaya merintis dibukanya program studi PLB pada jenjang S2. Pada tahun 2004 program studi ini menjadi mandiri dengan nama Program Studi Inklusi dan Pendidikan Kebutuhan Khusus.

Hayati, dkk (2023: 14) menyimpulkan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Mulai dari pandangan masyarakat yang penuh stigma dan diskriminasi pada masa *pra-modern* hingga masa modern yang lebih *inklusif*, setiap periode menunjukkan peningkatan kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak ABK (Kim *et al.*, 2022). Dari masa segregasi hingga munculnya pendekatan pendidikan inklusif, pendidikan ABK kini telah diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan umum di banyak negara. Dukungan dari berbagai kebijakan, perkembangan metode pendidikan, serta kemajuan teknologi telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan ABK secara keseluruhan (Rokach & Clayton, 2023).

3. Pendidikan Inklusif

Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif Depdiknas (2009) dalam Rosnita (2022: 328) menjabarkan landasan filosofi yaitu: (1) dalam (Rezeki & Rusydi), landasan filosofi ialah hak yang mendasar bagi anak normal dan ABK adalah pendidikan yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, (2) di Indonesia, landasan filosofi pendidikan *inklusif* ialah Pancasila di mana dalam keragaman baik budaya, tradisi, keyakinan, dan etnik yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, dan (3) menurut pandangan agama (Islam) yaitu lahirnya manusia dalam keadaan bersih (suci), manusia dilihat dalam ketaqwaannya,

berbeda-bedanya manusia untuk saling menghargai.

Landasan yuridis yaitu (1) Internasional, deklarasi Salamanca yaitu anak dapat belajar bersama-sama tanpa melihat perbedaan atau kesulitan, dan (2) di Indonesia, di UU No 20 Tahun 2003 dalam pasal 15 tentang SPN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan untuk abk dapat diselenggarakan berupa sekolah khusus atau inklusif.

Landasan pedagogis, yaitu agar peserta didik menjadi orang bertanggung jawab & demokratis (berpartisipasi dan menghargai setiap perbedaan di lingkungan sekitar), sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam tujuan pendidikan nasional ialah terbentuknya peserta didik menjadi manusia beriman & bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, mandiri, cakap, demokratis, dan bertanggung jawab.

Landasan empiris, yaitu dalam mendasari kebijakan nasional bahwa inklusif merupakan prinsip fundamental dimana yang terdiri dari konsep yang fokus pada pencapaian akademik, fisik, & emosional. Selain itu, agar tidak diskriminasi dalam proses asesmen dan evaluasi, tidak membedakan karakteristik seseorang, serta dalam mengembangkan strategi harus ada koordinasi oleh semua menteri. Komponen Penyelenggaraan Pendidikan *Inklusif* Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Peserta didik, baik ABK atau anak normal. Kurikulum, berlakunya standar nasional di sekolah umum, sedangkan ABK sesuai kebutuhan. Tenaga pendidik, terdiri dari guru mapel, guru pembimbing khusus, dan guru kelas. Kegiatan pembelajaran, terdiri dari perencanaan yang telah disusun yang sesuai dengan prinsip KBM. Penilaian & sertifikasi, yaitu modifikasi dalam pengembangan kurikulum. Manajemen sekolah, yaitu kewenangan dari sekolah dalam merencanakan, mengkoorganisasikan,

melaksanakan, bahkan mengevaluasi. Penghargaan (prestasi) & sanksi (lalai atau melakukan kesalahan). Pemberdayaan masyarakat, baik langsung atau tidak langsung adanya partisipasi dan dukungan masyarakat.

Pada intinya, pendidikan *inklusif* berkontribusi terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas fisik dan mental. Diharapkan siswa yang belajar di ruang kelas pendidikan inklusif mampu beradaptasi dengan keadaannya dan belajar sesuai haknya. Metode pembelajaran yang sesuai adalah metode pembelajaran adaptif yang menyesuaikan pembelajaran dengan situasi siswa. Hal ini tidak berarti bahwa pembelajaran menyesuaikan diri dengan siswa dan siswa menyesuaikan diri dengan pembelajaran. Pembelajaran juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan lebih aman digunakan. Karena pada dasarnya anak berkebutuhan khusus cenderung lebih istimewa dan memerlukan perhatian khusus.

Tujuan pendidikan *inklusif* mengacu kepada UUD. No. 2, tahun 2003, Sisdiknas Pasal 1, ayat 1 : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 2018 mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

kesimpulan dari penelitian tersebut adalah "pendidikan *inklusif* merupakan pendidikan yang menerima berbagai karakter dan latar belakang peserta didik untuk belajar bersama dalam satu iklim pembelajaran. Secara sempit, pendidikan *inklusif* sering dihubungkan dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan *inklusif* merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan

keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Faktor pendukung pendidikan *inklusif* yaitu adanya kepedulian pemerintah, keterlibatan *stakeholder* sebagai penyelenggaraan pendidikan, adanya kepedulian pihak dunia usaha, kebijakan sekolah dan orang tua yang mendukung, sedangkan faktor penghambat pendidikan *inklusif* yaitu kurangnya pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan guru bukan dari pendidikan luar biasa. Pada umumnya guru di sekolah dasar berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus secara spesifik. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan *inklusif* adalah kurikulum yang belum berorientasi disusun untuk program sekolah *inklusif*, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik" (Sarima, 2023: 78).

Firdausyi (2024: 14) menafsirkan anak berkebutuhan khusus merujuk pada kondisi di mana anak memiliki karakteristik yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, mengalami keterbatasan atau perbedaan baik secara fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional. Pendidikan inklusif mencerminkan ideologi dan tujuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang merangkul semua individu. Ini tidak hanya tentang penerimaan, tetapi juga pelayanan yang menyeluruh. Di sekolah reguler, dibutuhkan guru yang hebat, kuat, dan mampu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Hal ini penting agar semua siswa merasa diakui dan dihargai. Dengan demikian, baik anak-anak yang perkembangannya normal maupun anak-anak berkebutuhan khusus dapat hidup bersama secara harmonis. Hal ini diharapkan dapat mencegah persepsi negatif

yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial ketika mereka dewasa nanti.

Hanifah (2021: 481-482) menerangkan kesadaran orangtua dan masyarakat (lingkungan sosialnya) juga merupakan suatu hal yang penting untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran sebab anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan besar dari orangtua dalam pengambilan keputusan. Penerimaan dari masyarakat (lingkungan sosialnya) juga berpengaruh terhadap mental anak.

4. Jenis-jenis ABK

Ndek (2023: 47) menyimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lain yang seusia dengannya.

Menurut Kauffman & Hallahan (2006) dalam Sujoko (2023: 48) menjelaskan bahwa setidaknya ada 9 (sembilan) jenis ABK, kesembilan jenis tersebut adalah: *Mental retardation (tunagrahita)* atau anak dengan hambatan perkembangan (*child with development impairment*), *Learning disabilities* (kesulitan belajar) atau anak yang berprestasi rendah, *Attention Deficit Disorder with Hyperactive* (hiperaktif), *Emotional and behavioral disorder (tunalaras)*, *Communication disorder and deafness (tunarungu wicara)*, *Partially seeing and legally blind (tunanetra)* atau anak dengan hambatan penglihatan), *Autistik*, *Physical handicapped (Tunadaksa)*, *Giftedness and special talents* (anak berbakat).

Menurut Mais (2016) dalam Sujoko (2023: 49) yang termasuk kedalam Anak Berkebutuhan Khusus antara lain:

- 1) *Tunanetra*
- 2) *Tunarungu*
- 3) *Tunagrahita*

- 4) *Tunadaksa*
- 5) *Tunalaras*
- 6) Kesulitan Belajar
- 7) Gangguan Perilaku
- 8) Anak Berbakat
- 9) Anak Dengan Gangguan Kesehatan
- 10) Kesulitan Bersosialisasi

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada klasifikasi dan jenis kelainan, secara umum anak berkebutuhan khusus dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok kelainan, yaitu kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan sosial.

Menurut Hidayah (2019: 2) jenis disabilitas atau kebutuhan khusus anak berbeda-beda berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Ada disabilitas yang gejala-gejalanya terlihat nyata (*observable* dan *visible*) sehingga hanya melalui pengamatan sepintas oleh orang awam sekalipun dapat diketahui bahwa anak mengalami disabilitas. Ada pula disabilitas yang gejala-gejala awalnya sulit terlihat secara kasat mata, bahkan oleh orang terdekatnya sekalipun. Gejala-gejala baru akan diketahui setelah interaksi yang cukup intensif dengan anak atau setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh profesional.

Rini (2016) dalam Setyaningsih (2022: 8) menjabarkan Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyebab anak berkebutuhan khusus adapun faktor tersebut dapat dikelompokkan berikut:

1. Faktor *heriditer*
2. Faktor infeksi
3. Faktor keracunan
4. Kekurangan gizi

Sedangkan anak berkebutuhan khusus bila ditinjau dari waktu terjadinya kelainan dapat dikelompokkan:

1. *Pre-natal*
2. *Peri-natal*
3. *Pasca-natal*

Kelainan yang diderita anak dapat

menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap keluarga maupun anak itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan adanya anak berkebutuhan khusus dapat dibagi menjadi:

1. Dampak fisiologis
2. Dampak psikologis, dan
3. Dampak sosiologis.

D. Kesimpulan

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Mulai dari pandangan masyarakat yang berprasangka buruk dan diskriminatif pada era *pra-modern* hingga era *modern* yang lebih *inklusif*, setiap era semakin meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak ABK. Dari era *segregasi ras* hingga munculnya pendekatan pendidikan *inklusif*, pendidikan ABK kini diakui sebagai bagian *integral* dari sistem pendidikan umum di banyak negara. Berbagai dukungan kebijakan, pengembangan metode pelatihan, dan kemajuan teknologi telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelatihan dan kesejahteraan ABK secara keseluruhan. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan global dalam pelatihan ABK, perbedaan dalam kebijakan dan implementasi di berbagai negara mencerminkan tantangan yang berbeda tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya.

E. Daftar Pustaka

- Fauzan, Habib Nur, dkk. 2021. Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju *Inklusif*. *Pensa : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3 (3), 497-498
- Iswati, I., & Rohaningsih, C. 2021. Pembelajaran PAI Melalui Pendekatan *Humanistik* Pada Anak

- Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (2), 81–91.
- Fitrianiingrum, Rafa, dkk. 2023. Pendekatan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *JPVS: Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni*. 2 (1), 57.
- Hartadi, D. R., Dewantoro, D. A., & Junaidi, A. R. (2019). Kesiapan Sekolah Dalam Melaksanakan Pendidikan *Inklusif* Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ortopedagogia*, 5 (2), 90.
- Herawati, N. I. 2016. Pendidikan Inklusif. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 2 (1), 502.
- Rosnita, dkk. 2022. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Strategi Dampingi Dan Motivasi. *Jurnal Guru Kita*, 6 (3), 328.
- UUD. No. 2, tahun 2003, Sisdiknas Pasal 1, ayat 1
- Sarima, Andi. 2023. Pendidikan *Inklusi* (Anak Berkebutuhan Khusus) Perspektif Ilmu Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Qayyimah*, 6 (1), 78.
- Firdausyi, Muhammad Fajar. 2024. Mutu Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2 (2), 14.
- Hanifah, Diva Salma, dkk. 2021. Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalani Pendidikan *Inklusi* Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2 (3), 481-482.
- Ndek, Fransiska Saveriana, dkk. 2023. Peran Fasilitas Pendidikan Dalam Meningkatkan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1 (1), 47.
- Sujoko. 2023. *Psikologi Pendidikan Anak Dan ABK*. Surakarta: USB Press.
- Hidayah, Nurul, dkk. 2019. *Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Setyaningsih, Rahayu, dkk. 2022. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Surakarta: CV Tahta Media Group.
- Hayati, Rahmi, dkk. 2023. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Kim, J., Robinson, N., Härmä, J., Jeffery, D., Rose, P., & Woldehanna, T. (2022). *Misalignment Of Policy Priorities and Financing for Early Childhood Education: Evidence from Ethiopia, Liberia, and Mainland Tanzania. International Journal of Educational Research*, 111, 1–7
- Rokach, A., & Clayton, S. (2023). *What Causes Adverse Childhood Experiences (ACEs)? Adverse Childhood Experiences and Their Life-Long Impact*, 19–34.